

**PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA, DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2018 - 2022**

Indri Dwi Lestari^{1*}, Aprillia Nilasari²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya
indri.21017@mhs.unesa.ac.id^{1*}, aprillianilasari@unesa.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian berupa analisis data panel. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Kata kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Upah Minimum Kabupaten/Kota

ABSTRACT

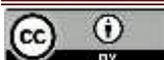
This study aims to analyze the effect of population growth rate, labor force participation rate, and district/city minimum wage on the open poverty rate in districts/cities in West Java Province in 2018-2022. This study uses a quantitative method with a research design in the form of panel data analysis. Secondary data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Java Province. The analysis method used is panel data regression with a fixed effect model. The results of the study indicate that the population growth rate and labor force participation rate have a negative and significant effect on the open poverty rate, while the district/city minimum wage has a positive and significant effect on the open poverty rate. Simultaneously, the three independent variables have a significant effect on the open poverty rate.

Keywords: Open Unemployment Rate, Population Growth Rate, Labor Force Participation Rate, District/City Minimum Wage

PENDAHULUAN

Pengangguran telah menjadi masalah ekonomi yang sulit diselesaikan di berbagai negara. Indonesia sebagai negara yang masih tergolong berkembang, juga menghadapi persoalan ini, di mana salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (Salsabila, et al., 2024). Seseorang dapat dikatakan pengangguran terbuka jika ia tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya dipengaruhi oleh peningkatan penduduk dan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja (Qomariyah, et al., 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2018 hingga 2022 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan kecenderungan mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun-tahun tertentu. Tahun 2018, TPT tercatat 5,13 persen, kemudian meningkat menjadi 6,2 persen pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 5,83 persen seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, fluktuasi ini mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pulau Jawa menempati posisi tertinggi dalam tingkat



pengangguran, di mana Provinsi Jawa Barat mencatat angka pengangguran yang melebihi rata-rata nasional karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kenaikan dan penurunan TPT di Jawa Barat, berdasarkan data BPS dari 2018 hingga 2022, mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks. Setelah sempat menurun tipis, pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan TPT yang signifikan pada tahun 2020, menggarisbawahi dampak besar pandemi terhadap lapangan kerja. Upaya pemulihan ekonomi kemudian membuahkan hasil dengan penurunan TPT di tahun 2021 dan 2022, di mana penurunan pada tahun 2022 bahkan lebih signifikan dibandingkan rata-rata penurunan secara nasional. Meski demikian, capaian ini belum cukup untuk mengangkat Jawa Barat dari posisi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia.

Kenaikan dan penurunan TPT di Jawa Barat, berdasarkan data BPS dari 2018 hingga 2022, mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks. Setelah sempat menurun tipis, pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan TPT yang signifikan pada tahun 2020, menggarisbawahi dampak besar pandemi terhadap lapangan kerja. Upaya pemulihan ekonomi kemudian membuahkan hasil dengan penurunan TPT di tahun 2021 dan 2022, di mana penurunan pada tahun 2022 bahkan lebih signifikan dibandingkan rata-rata penurunan secara nasional. Meski demikian, capaian ini belum cukup untuk mengangkat Jawa Barat dari posisi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia.

Faktor kedua yang juga memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu ada TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi yaitu Kota Cimahi dengan angka 71,00 persen di tahun 2022, dilanjut Kota Bandung di angka 68,50 persen. Sementara itu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang lebih rendah, masing-masing sebesar 61,20 persen dan 62,00 persen. Peningkatan TPAK ini berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 8,31%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 9,82% pada Agustus 2021.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran ialah upah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS),

kenaikan nominal upah minimum Jawa Barat di setiap tahunnya tidak terlalu signifikan namun tetap ada peningkatan sekitar 19,24%. Meskipun demikian, di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat perbedaan yang lebih besar, seperti yang terlihat Dengan upah minimum tahun 2018 tertinggi di Kabupaten Karawang sebesar Rp 3.919.291,19, dan upah minimum terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.558.793,94. Pada tahun 2022, UMK tertinggi di Jawa Barat tercatat di Kota Bekasi dengan Rp 4.816.921,17, menunjukkan peningkatan sekitar 22,90% dibandingkan dengan tahun 2018. Sementara itu, UMK terendah ada di Kota Banjar sebesar Rp 1.852.099,52, dengan kenaikan sekitar 18,82% dibandingkan dengan 2018. Meskipun persentase kenaikannya tidak terlalu besar, tetap terdapat tren peningkatan upah minimum selama periode tersebut, mencerminkan perbaikan meskipun dengan perbedaan antara daerah yang lebih tinggi dan lebih rendah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta upah minimum secara signifikan memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Beberapa studi menemukan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja cenderung menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan kenaikan upah minimum dapat berpotensi meningkatkan pengangguran akibat biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Selain itu, dinamika pengangguran pasca-pandemi COVID-19 juga mulai menjadi fokus kajian, namun masih terbatas pada tingkat provinsi dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam pada level kabupaten/kota di Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis simultan terhadap pengaruh ketiga variabel utama tersebut terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, fenomena Angka Pengangguran Terbuka masih menjadi permasalahan yang menantang untuk dipecahkan. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan peningkatan, dan upah minimum di kabupaten/kota mengalami kenaikan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi



Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat" adalah subjek yang menarik bagi peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah orang yang dikategorikan sebagai pekerja yang menganggur ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang secara aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang mencari pekerjaan pertama dan mereka yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya, disebut sebagai pengangguran terbuka. Sebagai persentase dari seluruh angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, salah satu cara umum untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu daerah adalah dengan melihat tingkat pengangguran terbuka.

Menurut pendapat umum, upah akan turun jika terjadi kelebihan tenaga kerja. Hasil produksi perusahaan menurun akibat pemotongan gaji ini. Namun, karena biaya produksi yang lebih rendah, perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar, sehingga dapat memperluas produksi dan meningkatkan permintaan tenaga kerja (Manshuri, 2020).

Studi ini menemukan bahwa meskipun pasokan tenaga kerja dipengaruhi oleh laju peningkatan populasi, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Pergeseran jumlah penduduk di suatu wilayah selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya dikenal sebagai pertumbuhan populasi, menurut BPS. Jumlah pengangguran akan terus meningkat jika populasi di suatu area terus tumbuh sementara terdapat kekurangan lahan yang sesuai.

Karena keterbatasan kapasitas negara berkembang untuk menciptakan lapangan kerja baru, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan sejumlah masalah dan hambatan bagi pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja. Masalah seperti meningkatnya pengangguran, pergeseran distribusi usia, dan tren urbanisasi sering kali disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk (Subandi, 2011)

Teori Malthus menyatakan bahwa tenaga kerja dihasilkan sebanding dengan ukuran populasi. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan tersedianya peluang kerja yang mencukupi (Setiawati, 2023). Terbatasnya jumlah lapangan

kerja menyebabkan sebagian angkatan kerja tidak terserap dan akhirnya menjadi pengangguran.

Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung mengikuti pola eksponensial (deret ukur), sedangkan peningkatan sumber daya pangan berlangsung secara linear (deret hitung). Ia menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor pembatas pertumbuhan penduduk yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu preventive checks dan positive checks. Dalam preventive checks, pengendalian populasi dilakukan dengan menekan angka kelahiran melalui pembatasan hasrat seksual secara moral (moral restraint) atau melalui praktik-praktik seperti aborsi, homoseksualitas, pergaulan bebas, dan perselingkuhan (vice). Sementara itu, positive checks adalah penurunan jumlah penduduk yang terjadi akibat kematian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, kejahatan, dan pembunuhan (vice), serta berbagai penyebab lain seperti wabah penyakit, bencana alam, kelaparan, dan peperangan (misery).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk aktif pada penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun mempunyai potensi menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang berpartisipasi dalam dunia kerja, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan produksi, yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, banyak orang yang tidak melakukannya. Jumlah angkatan kerja (yang masih bersekolah dan menghidupi keluarga) menyusut jumlah pekerja yang turut menurunkan tarif TPAK.

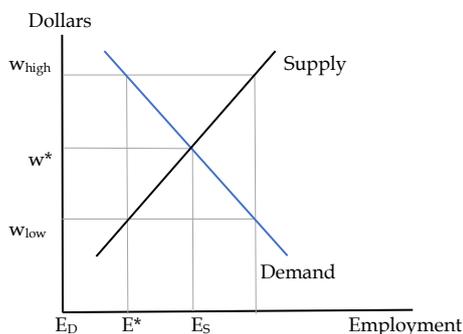
Menurut teori lewis, Kelebihan tenaga kerja seharusnya tidak dipandang sebagai kendala, melainkan sebagai potensi. Surplus tenaga kerja dalam suatu sektor dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor lain (Ningsi, 2023). Lewis berpendapat bahwa melimpahnya tenaga kerja tidak menjadi penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Justru, jumlah pekerja yang berlebih dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan pendapatan, dengan catatan bahwa alih tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berlangsung secara efektif dan tidak akan mencapai titik kelebihan yang berbahaya.



Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum yang diungkapkan atau dinilai dalam uang seperti yang ditentukan oleh kesepakatan atau undang-undang dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan karyawan, adalah tunjangan bulanan terendah yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan untuk tenaga kerja atau layanan yang telah dilakukan. Ini termasuk manfaat bagi karyawan dan keluarga mereka. Upah minimum regional dinaikkan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia, yang menguntungkan pekerja dengan memungkinkan mereka meningkatkan standar hidup mereka (Suhadi, et al. 2022).

Berdasarkan Teori Neoklasik, kenaikan tingkat upah akan mendorong peningkatan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun seiring dengan naiknya tingkat upah (Ghinastri & Syafitri, 2024).



Gambar 1. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Kaitan antara upah minimum dan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui teori permintaan dan penawaran tenaga kerja sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3, di mana titik perpotongan antara W^* dan E^* merepresentasikan kondisi ekuilibrium di pasar tenaga kerja. Ketika upah berada di atas upah ekuilibrium, kurva permintaan hanya menunjukkan bahwa pengusaha hanya bersedia untuk mempekerjakan E_D , sedangkan kurva penawaran berada di E_S yang sedang mencari pekerjaan. Upah di atas titik ekuilibrium ini mengartikan bahwa ada banyak pekerja yang bersaing untuk mendapatkan sedikit pekerjaan. Selisih antara E_D dan E_S merupakan jumlah pengangguran. Pengusaha akan mempekerjakan sejumlah besar pekerja jika upah turun di bawah titik ekuilibrium, atau W_{low} , tetapi sangat sedikit pekerja yang akan

menerima tingkat upah yang diberikan.

Kerangka Berpikir

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pertumbuhan penduduk (meningkatkan persaingan lapangan kerja), TPAK (mencerminkan partisipasi tenaga kerja), dan UMK (berdampak pada biaya tenaga kerja dan daya beli). Kerangka teori menggunakan keseimbangan permintaan-penawaran tenaga kerja klasik, di mana pengangguran muncul akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja (penawaran) dan kebutuhan pasar (permintaan). Contohnya, UMK tinggi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, sementara pertumbuhan penduduk memperbesar penawaran tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja.

Analisis menggunakan regresi data panel untuk mengukur pengaruh ketiga variabel secara simultan pada data lintas waktu dan wilayah. Metode ini memungkinkan identifikasi pola spasial-temporal dan kontribusi relatif masing-masing faktor terhadap TPT. Hasilnya diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan terpadu untuk menyeimbangkan dinamika tenaga kerja melalui intervensi pertumbuhan ekonomi, pengendalian upah, dan penyerapan tenaga kerja.

Hipotesis Penelitian

H1: Diduga Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran

Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

H2: Diduga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

H3: Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

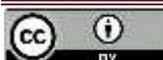
H4: Diduga Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan

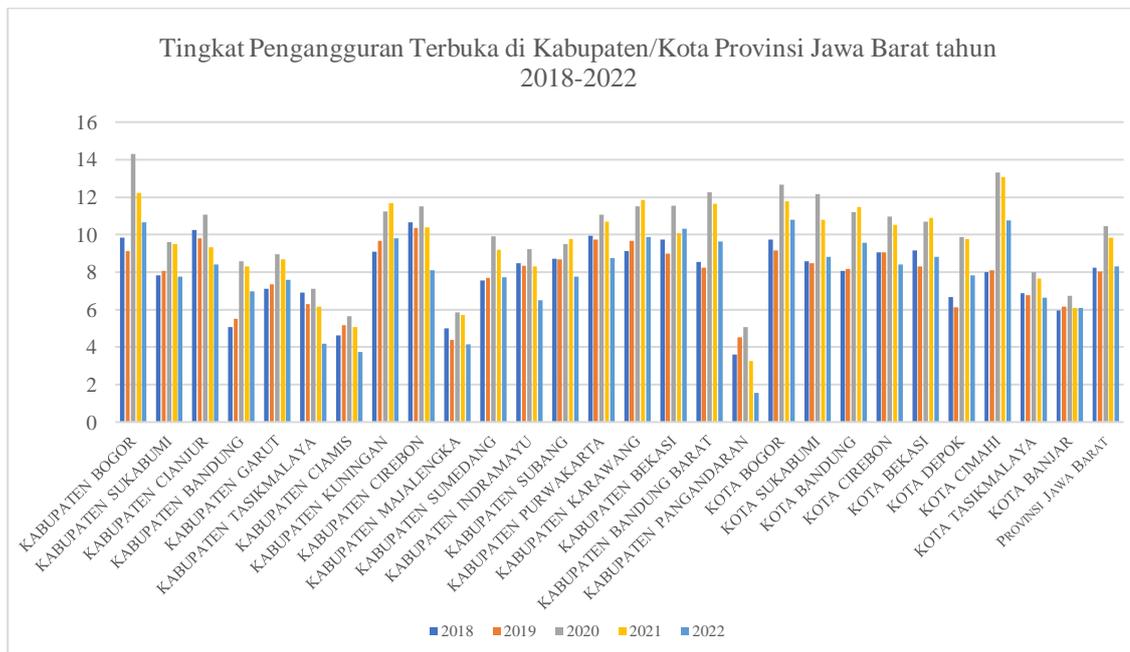


analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Open Data Jabar Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka analisisnya, penelitian mengklasifikasikan variabel ke dalam dua kelompok utama. Variabel dependen dalam kelompok pertama adalah tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota, diukur secara persentase melalui rasio antara jumlah pengangguran dan total angkatan kerja dalam periode yang sama. Kelompok kedua mencakup tiga variabel independen, yakni Pertumbuhan jumlah penduduk (X_1), partisipasi angkatan kerja (X_2), dan besaran upah minimum pada level kabupaten/kota (X_3).

Tingkat pengangguran (Y) didefinisikan sebagai persentase jumlah individu pengangguran terhadap total angkatan kerja di setiap kabupaten/kota. Pengangguran merujuk pada individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Persentase perubahan jumlah penduduk dalam tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikenal sebagai laju pertumbuhan populasi (X_1), dan ini menunjukkan seberapa cepat populasi tumbuh di

daerah tersebut. Persentase penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dikenal sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (X_2), dan ini menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (X_3) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, yang menjadi batas minimum upah yang harus diterima oleh pekerja, diukur dalam satuan rupiah.

Dalam studi ini, analisis regresi data panel digunakan. Penelitian ini menggabungkan data cross-sectional dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan data time series sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Dalam analisis regresi data panel, tersedia tiga model yang dapat digunakan: common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji spesifikasi model yang terdiri dari uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Setelah model yang terpilih ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan serangkaian pengujian yang mencakup uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi.



Gambar 2. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik tersebut, tingginya angka pengangguran di beberapa kabupaten dan kota di wilayah tersebut memberikan kontribusi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2018, Kabupaten Cirebon mencatat persentase pengangguran tertinggi sebesar 10,64

persen, sedangkan Kabupaten Pangandaran mencatat persentase terendah sebesar 3,59 persen. Pada tahun 2019 masih sama nilai tertinggi masih diduduki Kabupaten Cirebon sebesar 10.35 persen dan untuk nilai terendah diduduki oleh Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 4.37 persen.

Tahun 2020 yang memiliki nilai tertinggi berganti di Kabupaten Bogor sebesar 14.29 persen, sedangkan nilai yang terendah diduduki kembali oleh Kabupaten Pangandaran dengan nilai sebesar 5.08 persen. Tahun 2021 yang menduduki nilai tertinggi yaitu Kota Cimahi sebesar 13.07 persen, sedangkan yang memiliki nilai terendah masih diduduki Kabupaten Pangandaran mencatat nilai sebesar 3,25 persen. Pada tahun 2022, Kota Bogor mencapai 10,78 persen, sementara nilai terendah terdapat di Kabupaten Ciamis dengan 3,75 persen.

Ketidacocokan antara kemampuan pekerja dan permintaan pasar, rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar pencari kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat yang tidak seimbang dengan masuknya pekerja baru adalah penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Cirebon pada tahun 2018–2019. Kabupaten Bogor mengalami tingkat pengangguran yang tinggi pada tahun 2020 dan 2022 karena beberapa alasan mendasar. Di tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda, memaksa pembatasan sosial dan penutupan bisnis yang mengakibatkan gelombang PHK. Akibatnya, tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor melonjak tajam. Meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, ketidakpastian masih berlanjut, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata dan manufaktur. Pada tahun 2022, meski terlihat adanya pemulihan ekonomi yang signifikan dan penurunan angka pengangguran, dampak pandemi sebelumnya masih terasa. Secara keseluruhan, fluktuasi tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor mencerminkan dampak besar pandemi terhadap pasar tenaga kerja dan kapasitas ekonomi lokal untuk beradaptasi dan pulih. Kabupaten Pangandaran sering memiliki tingkat pengangguran terendah pada periode 2018-2022 karena sektor pariwisata yang berkembang pesat mampu menyerap banyak tenaga kerja, didukung oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pengembangan ekonomi lokal dan pelatihan keterampilan masyarakat turut membantu menekan angka pengangguran

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uji data panel dengan *eviews*, telah didapatkan model terbaik pada penelitian ini yaitu model fixed effect. Persamaan dalam regresi data panel yang diperoleh adalah:

$$TPT = 14.20514 - 0.458165 LPP - 0.196658 TPAK + 2.701307 UMK$$

- a. Nilai koefisien variabel laju pertumbuhan penduduk adalah -0,458165 dengan

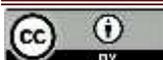
probabilitas $0,0385 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara statistik, variabel laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien yang negatif mengindikasikan hubungan yang berlawanan arah antara laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, dapat dikatakan bahwa untuk setiap peningkatan 1% dalam tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran akan turun sebesar 0,458165.

- b. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai koefisien sebesar -0,196658 dan nilai probabilitas sebesar $0,0004 < 0,05$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan terbuka di Provinsi Jawa Barat secara statistik dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel tingkat partisipasi angkatan kerja. Hubungan searah antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja ditunjukkan oleh nilai koefisien negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,196658%, dengan asumsi variabel lainnya dalam keadaan konstan.
- c. Variabel koefisien upah minimum memiliki nilai 2,701307 untuk kabupaten/kota, dan nilai probabilitasnya adalah $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara statistik upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Upah minimum kabupaten/kota dan tingkat pengangguran terbuka memiliki korelasi langsung, seperti yang terlihat dari nilai korelasi positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1% maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 2.701307% dengan mengasumsikan bahwa variabel-variabel lainnya berada dalam kondisi tetap.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara teratur atau tidak, dilakukan uji normalitas. Uji Normalitas menunjukkan



bahwa nilai probabilitas sebesar 0.403727, yang lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi, pengujian multikolinieritas dilakukan. Hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan nilai korelasi antara variabel bebas sebagai berikut: variabel LPP dan TPAK sebesar -0.17, variabel LPP dan UMK sebesar 0.44, dan -0.23 adalah variabel TPAK dan UMK. Karena nilai P setiap variabel independen lebih kecil dari 0.8, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji adanya ketidaksamaan varians pada residual dalam model regresi. Masing-masing variabel bebas mempunyai nilai probabilitas LPP sebesar $0,76 > 0,05$, TPAK sebesar $0,21 > 0,05$, dan UMK sebesar $0,07 > 0,05$ berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas. Dengan demikian, H_0 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

- a. Nilai koefisien variabel laju pertumbuhan penduduk adalah -0,458165 dengan probabilitas $0,0385 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, variabel laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- b. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai koefisien sebesar -0,196658 dan nilai probabilitas sebesar $0,0004 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.
- c. Pada tingkat kabupaten/kota, variabel upah minimum memiliki nilai koefisien sebesar 2.701307 dan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara statistik upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi

Jawa Barat.

2. Uji F (Simultan)

Nilai F-statistik atau F-hitung sebesar 17.61500 dengan nilai Probabilitas (F-statistik) sebesar $0.000000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat.

3. Uji Koefisien Determinan R^2 (R-Square)

Variabel independen dapat menjelaskan 78,24% dari variabel dependen, sesuai dengan nilai R^2 yang disesuaikan sebesar 0,782409. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum kabupaten/kota, dapat digunakan untuk memprediksi pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sisanya sebesar 21,76% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

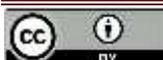
PEMBAHASAN

Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, artinya semakin tinggi pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran cenderung menurun.

Fenomena ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu pesatnya pertumbuhan sektor industri yang menyumbang 41,47% PDRB (Rp654,7 triliun) pada 2022, terutama di kawasan industri seperti KIIC dan Jababeka yang banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor pertanian modern dengan produksi 9,43 juta ton gabah kering giling dan Indeks Forward Linkage yang tinggi turut mendukung kebutuhan sektor lain. Sektor jasa juga berperan besar dengan kontribusi 58% PDRB (Rp921 triliun), terutama melalui perdagangan, pariwisata, dan teknologi informasi di wilayah metropolitan seperti Bandung Raya.

Studi ini tidak sejalan dengan teori Malthus, yang menyatakan bahwa pengangguran akan meningkat dan standar hidup akan menurun jika ekspansi populasi melebihi sumber daya yang tersedia. Namun, hasil penelitian di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan sebaliknya, yaitu semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk justru berhubungan dengan penurunan tingkat pengangguran. Ini terjadi sebagai akibat



dari kemampuan pertumbuhan populasi yang cepat untuk merangsang pertumbuhan dan kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja tambahan. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat menjadi faktor yang berpotensi mengurangi pengangguran terbuka, asalkan pertumbuhan ekonomi seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, pengangguran akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiningwarni, et al. (2019) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini berarti, peningkatan LPP justru berkontribusi pada penurunan TPT. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Jawa Timur tidak menjadi masalah, melainkan berpotensi menurunkan tingkat pengangguran, dan pengaruh ini signifikan secara statistik. Diduga sektor-sektor ekonomi di Jawa Timur mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja seiring dengan meningkatnya populasi.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil uji regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Hubungan non-searah antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja ditunjukkan oleh nilai koefisien negatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berkontribusi secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat karena adanya hubungan langsung antara keterlibatan masyarakat dalam angkatan kerja dengan peluang kerja yang tersedia.

TPAK mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ketika TPAK meningkat, lebih banyak individu yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka karena semakin banyak orang yang berhasil terserap dalam lapangan kerja.

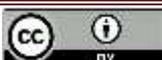
Penelitian ini sejalan dengan teori Lewis yang menekankan pentingnya perpindahan tenaga

kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi menunjukkan bahwa persentase populasi yang lebih besar terlibat dalam angkatan kerja, yang dapat menurunkan pengangguran karena lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan, terutama karena ekonomi tumbuh dan lebih banyak pekerjaan tercipta di sektor industri. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja menyediakan pasokan tenaga kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja, seperti pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja, dapat efektif mengurangi pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badria, F.A (2021) yang menunjukkan bahwa secara parsial, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka karena pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja, khususnya di kelompok tenaga kerja muda. Namun, di lima provinsi, partisipasi penduduk yang bekerja tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Hilangnya lapangan pekerjaan akibat pandemi menjadi salah satu variabel yang menyebabkan hal ini. Akibatnya, meskipun lebih banyak orang mencari pekerjaan, kesempatan kerja yang tersedia terbatas, sehingga angka pengangguran semakin bertambah.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model variabel upah minimum kabupaten/kota memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya hubungan searah antara upah minimum kabupaten/kota dan tingkat pengangguran terbuka. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, UMK di Kabupaten Karawang naik dari Rp3.919.291 pada tahun 2018 menjadi Rp4.798.312 pada tahun 2022. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membawa tantangan bagi



perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Ketika biaya tenaga kerja meningkat, banyak perusahaan merasa tertekan dan mungkin memilih untuk mengurangi jumlah karyawan atau membatasi perekrutan baru. Sebagai konsekuensinya, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi.

Studi ini mendukung teori neoklasik, yang menyatakan bahwa penawaran dan permintaan menentukan upah di pasar tenaga kerja yang beroperasi serupa dengan pasar komoditas. Jika upah minimum ditetapkan di atas tingkat ekuilibrium pasar, perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pandangan teori neoklasik bahwa intervensi pemerintah melalui penetapan upah minimum dapat menimbulkan distorsi dan konsekuensi pengangguran.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghinastri & Syafitri (2024) yang mengindikasikan bahwa upah minimum di tingkat kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka karena kenaikan UMK dapat mengurangi kesempatan kerja akibat perusahaan mengurangi perekrutan atau mengganti tenaga kerja dengan teknologi. Hal ini terutama berdampak pada industri padat karya yang rentan terhadap perubahan upah minimum, sehingga memaksa perusahaan mengurangi produksi atau menutup usaha. Selain itu, kenaikan UMK dapat memicu ekspektasi upah yang lebih tinggi, meningkatkan jumlah pencari

kerja yang tidak bersedia menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah, dan mengurangi investasi karena biaya tenaga kerja yang tinggi.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil uji F dengan menggunakan Fixed Effect Model. Ketiga variabel independen, yakni laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum kabupaten/kota, secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Maka hasil penelitian ini menunjukkan positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat. Ketiga variabel ini saling terkait dalam menciptakan dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks, sehingga memerlukan analisis yang mendalam berdasarkan teori-teori ekonomi yang relevan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut saling memberikan kontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Laju pertumbuhan penduduk menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja karena jumlah pencari kerja terus bertambah tanpa diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan TPAK menunjukkan adanya surplus tenaga kerja yang belum terserap oleh sektor modern akibat keterbatasan transformasi struktural. Sementara itu, kenaikan UMK yang tidak seimbang dengan produktivitas pekerja justru menekan permintaan terhadap tenaga kerja formal

Tabel 1. Hasil Uji Fixed Effect Model

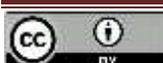
Variable	Coefficient	Prob.
C	14.20514	0
LPP	-0.458165	0.0385
TPAK	-0.196658	0.0004
UMK	2.701307	0
R-square		0.829500
Adjusted R-square		0.782409
F-statistic		17.61500
Prob(F-statistik)		0.000000

Sumber: Data diolah

KESIMPULAN

Laju pertumbuhan penduduk serta tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2022. Artinya, semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat

pengangguran terbuka cenderung menurun. Di sisi lain, upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum, tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat. Secara bersamaan, laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah



minimum kabupaten/kota memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah perlu memanfaatkan bonus demografi melalui pengembangan ekonomi kreatif generasi muda (inkubasi bisnis dan modal usaha), meningkatkan TPAK dengan pelatihan sektoral berbasis potensi lokal, menyesuaikan kenaikan UMK dengan produktivitas dan insentif sektoral, serta memperkuat kolaborasi antardaerah untuk penyaluran tenaga kerja melalui magang atau penempatan kerja lintas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badria, F. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2011-2020. 1–88.
- Basuki & Prawoto. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews) (1st ed).
- Daniel Collyn Damanik, & Rika Suriyanto Zalukhu. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.119>
- Diniarty, E. P., Wijimulawiani, B. S., & Anggara, J. (2025). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Dan Harga Terhadap Permintaan Perumahan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014–2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 79–84
- Dwiningwarni, et al. (2019). Population, Unemployment and Poverty: A Population Analysis in East Java Indonesia. *SU-AFBE*, 1-9.
- Ghinastri, & Syafitri. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.6>
- Intan Suswita, Darwin Damanik, & Pauer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.346>
- Ishak, K. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflaksinyaterhadap Indek Pembangunan Di Indonesia.
- Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Upah Minimum Kabupaten / Kota Terhadap Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27 –. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.334>
- Manshuri, N. H. (2020). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2020. *Skripsi*.
- Maulana, I., Salsabila, Z., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Dan PDRB Terhadap IPM Di Wilayah Provinsi Banten Pada Tahun 2019–2021. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 164-170
- Nainggolan, N. E., & Yusnida, Y. (2025). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1993–2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 213-219
- Ningsi. (2023). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran Di Provinsi Aceh. 1–127.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>
- Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *EcoGen*, 1, 162–168.
- Qamariyah1, et al. (2022). Pengaruh Ipm, Investasi, Dan Ump Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2013-2020. [Http://Jurnalfebi.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Oje](http://Jurnalfebi.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Oje), 7, 1–15.



- Riani, I. N., & Iryani, N. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 195-205
- Rustamana, A., Wahyuningsih, P., Azka, M. F., & Wahyu, P. (2024). Pendidikan Penelitian Metode Kuantitatif. *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 5(doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317), 1–10.
<https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Salsabila, et al. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022. *Journal of Administrative and Sosial Science*, 5, 92–107.
- Setiawati, T. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Inflasi, Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2022. Skripsi.
- Suhadi, et al. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10, 879–888.
- Suroya & Erdkhadifa. (2023). Pengaruh Pdrb, Ipm, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022. *Jurnal EK&BI*, 6(DOI [10.37600/ekbi.v6i1.793](https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i1.793)), 192–206.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148
- Tatang Syahban Adi Syahputra, Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 104–114.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.261>
- Wiguna, A. B. (2019). Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Timur: Apakah Upah Minimum Masih Menjadi Faktor Penentu? *Jurnal EcceS*, 6, 214–229.
- Winarti, V. P., Erliantari, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2017–2021. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 155-163

